

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Kovach dan Rosensteil dalam Nasution (2015) menyatakan bahwa jurnalis memiliki kewajiban dalam menyampaikan suatu kebenaran. Dalam melaksanakan kewajibannya kepada publik, seorang jurnalis harus memegang teguh dalam menyampaikan berita secara objektif (Azaria, 2019 : 3). Menurut McQuail, objektivitas adalah sikap netral terutama dalam menghindari pendapat pribadi serta subjektivitas wartawan dalam sumber berita (Effendy, 2016:6). Dalam menulis berita, wartawan dituntut untuk memiliki sikap objektif, kecepatan, dan keakuratan. Dengan memiliki sikap objektif, karya tulis berita yang dihasilkan wartawan tersebut akan objektif pula, artinya penyuguhan karya tulis yang dihasilkan tidak berat sebelah, selaras dengan kenyataan, bebas dari praduga atau tanpa praduga, netralitas yang terjaga, dan tanpa adanya pemihakan dalam penulisan berita (Kusumaningrat, 2016 : 54).

Berkaitan dengan penafsiran objektif tersebut, konteks peristiwa yang terjadi harus ditulis secara menyeluruh oleh wartawan, dan tidak terpenggal oleh kecenderungan subjektif. Sikap objektif seorang wartawan dalam berita yang ia tulis sangat sulit dan nyaris tidak mungkin, karena seringkali latar belakang wartawan tersebut menghiasi karya tulis beritanya (Kusumaningrat, 2016 : 55).

[Type here]

Sedangkan, menurut Everette E. Dennis menganggap bahwa objektivitas dalam pemberitaan bisa terjadi dan bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi dengan beberapa prinsip seperti: tidak menyatukan opini dalam fakta, tidak terdapat pandangan emosional saat melihat sebuah kejadian, adanya keadilan dan terdapat keseimbangan serta adanya dua perspektif dalam memandang suatu peristiwa. (Effendy, 2016:5).

Dalam setiap profesi, dituntut adanya kode etik, begitu pula dalam dunia jurnalis. Hal yang mengatur jurnalis adalah kode etik jurnalistik yang mengandung nilai, norma, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta dibentuk berupa peraturan-peraturan (Sari, 2014 : 132). Kode etik Jurnalistik menetapkan berbagai macam ketentuan dalam penulisan berita, diantaranya harus akurat. Akurat berarti berita tersebut harus tepat dan cermat. Selain itu, ada juga keberimbangan, adil, dan kelengkapan informasi harus ada pada berita, dan berita juga harus terlepas dari adanya percampuran fakta dan opini pribadi, atau biasa disebut dengan objektif. Serta, tentunya berita yang ditulis merupakan kejadian yang hangat, jelas, dan ringkas. (Kusumaningrat, 2016:47).

Pers memiliki dampak terhadap pemerintah. Melalui pers banyak tujuan dan kepentingan-kepentingan yang dilakukan pemerintah, seperti membangun dan menjaga dukungan yang diberikan oleh rakyat, mengumumkan kebijakan, dan memperoleh informasi (Nimmo, 2005:241). Maka, bukan persoalan mudah untuk membangun media yang transparan dalam penyiaran maupun pemberitaan, serta terhindar dari unsur politik dan bisnis. Untuk menjalankan pers bebas juga

mengalami kesulitan karena pandangan masyarakat yang memposisikan kelompok penguasa sebagai pengatur informasi (Susanto, 2013 : 483).

Secara geografis, letak Indonesia sangat strategis dengan luas wilayah maritim mencapai \pm 5,8 juta km². Luas wilayah tersebut membuat Indonesia kaya akan sumber daya alam laut hayati maupun nonhayati. Serta potensi dalam bidang perikanan mencapai 65 juta ton per tahun (Susanto & Munaf, 2015:97-98). Namun, letak geografis yang strategis juga rawan akan ancaman dan pelanggaran seperti China yang mengklaim Natuna dan melakukan *illegal fishing* (Susanto & Munaf, 2015:95-96). Hubungan China-Indonesia menegang akibat pelanggaran yang dilakukan oleh China terhadap Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE di wilayah Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ialah zona maritim selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal (Puspitawati, 2017 : 65).

Konflik yang terjadi antara China dan Indonesia di laut Natuna ini telah terjadi sejak 2016, berikut pelanggaran ZEE wilayah Indonesia oleh China selama masa pemerintahan Joko Widodo. Pada 19 Maret 2016, KKP menangkap kapal *illegal fishing* milik China, namun kapal *coast guard* China membantu kapal *illegal fishing* tersebut. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2016, KRI Oswald Siahaan 354 mengejar kapal China, Gui Bei Yu yang merupakan kapal penangkap ikan milik China yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 17 Juni 2016, KRI Imam Bonjol melepaskan tembakan ke udara dan laut, satu diantara tembakan tersebut mengenai kapal milik China yang mencuri ikan di laut Natuna. 19 Desember 2019, Bakamla mengusir kapal China yang memasuki ZEE Indonesia. 24 Desember 2019, kapal nelayan China melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia

[Type here]

dan dikawal dengan kapal *coast guard* China. 30 Desember 2019, kapal China kembali diusir dari perairan Indonesia oleh Bekamla. 3 Januari 2020, kapal *coast guard* China tetap melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meski nota protes telah dilayangkan. Lalu, hal yang sama kembali terjadi pada tanggal 12 September 2020 (Winda,2020 <https://www.kompas.tv/article/62030/natuna-sejarah-konflik-indonesia-dan-china>)

Pada akhir 2019 dan September 2020 ketegangan dua negara ini terjadi ketika kapal Coast Guard China memasuki dan mengawal kapal-kapal *illegal fishing* masuk ke wilayah ZEE Indonesia. China merasa tindakan ini bukanlah sebuah pelanggaran, karena China mengklaim wilayah laut Natuna sebagai bagian dari wilayah kekuasaannya berdasarkan *Nine Dash Line* yang telah ditentukan secara sepihak oleh China. *Nine Dash Line* adalah garis sembilan putus-putus yang dibuat pada tahun 1947 oleh pemerintah Kuo Mintang. Tetapi garis ini tidak memiliki definisi dan titik koordinat yang jelas (Usman & Sukma, 1997:5). UNCLOS 1982 juga tidak mengakui klaim sepihak tersebut. UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982) yang mengatur segala aspek yang berhubungan dengan fungsi laut yang merupakan penyedia sumber daya alam terbesar (Puspitawati, 2017:5).

Sementara itu, kepulauan Natuna telah terdaftar dalam PBB masuk dalam wilayah kedaulatan RI sejak 18 Mei 1956 (Effendy, 2017:4). Indonesia juga telah menerapkan konvensi PBB mengenai hukum laut dengan meratifikasi UU No. 17 Tahun 1985 mengenai Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Subagyo, 2013:59). Tidak hanya mengklaim laut Natuna sebagai wilayah

[Type here]

kekuasaannya, China juga melakukan *illegal fishing*. Hal ini tentunya membahayakan bagi Indonesia. Seperti yang tercantum dalam Pasal 19 butir 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982, lintas kapal asing dianggap membahayakan ketertiban Negara Pantai, keamanan, dan kedamaiannya jika kapal Asing melakukan beberapa hal yang tercatat dalam konvensi, salah satunya kegiatan perikanan di laut teritorial (Tunggal, 2008:17-18).

Sesungguhnya China-Indonesia memiliki kerja sama bilateral dalam bidang perikanan yang ditandatangani pada 19 Desember 2001. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun, dan kembali diperpanjang pada 16 Juli 2004. Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional antara keduanya yang mengatur masalah perikanan (Kurnia, 2018:181-182). Namun kedua perjanjian ini tidak menetapkan kuota tangkapan ikan, kuota masing-masing jenis ikan, jenis kapal, dan hari operasi penangkapan setiap tahunnya yang diperbolehkan. Hal ini membuat China dapat menangkap ikan di perairan Indonesia tanpa limit, hal ini dapat mengancam kelestarian dan populasi ikan, serta merugikan Indonesia sebagai negara pantai. Namun demikian, kedua negara tetap menjalankan perjanjian bilateral perikanan tersebut. Setelah berlaku selama tiga tahun, perjanjian ini resmi berakhir pada 16 Juli 2007 (Kurnia, 2018:188-189).

Menurut Webster dalam Sinaga (2013:23), konflik merupakan peperangan, perjuangan, atau perkelahian yang berupa pertikaian fisik yang melibatkan beberapa pihak. Lalu berkembang menjadi oposisi atau ketidaksepakatan terhadap ide maupun kepentingan, dll. Konflik merupakan pertentangan yang terjadi karena adanya desakan untuk mempertahankan dan berjuang atas kebutuhan yang terkait

[Type here]

dengan eksistensinya. Motif dari konflik yang terjadi secara lokal sampai global yaitu upaya mempertahankan dan memajukan eksistensinya. Konflik negara akan bermotif pada pemenuhan kebutuhan, suatu negara pasti akan melirik sumber ekonomi di negara lainnya untuk memenuhi kebutuhan mendesak demi eksistensi negaranya di masa depan (Sinaga, 2013:24-25).

Media yang dipilih oleh penulis adalah media *online* yang berfokus ke portal berita *online*, Kompas.com, Detik.com, dan Liputan6.com untuk mengetahui tingkat objektivitas media dalam memberitakan konflik China-Indonesia di laut Natuna. Penulis memilih media *online*, karena saat ini untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan dunia, khalayak tidak hanya bergantung pada media konvensional saja. Bahkan media *online* kini dijadikan pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka (Romli, 2012:18). Kemajuan internet juga dapat terlihat dari peralihan penggunaan media dalam mengakses berita, beberapa orang sudah membaca berita melalui internet, tidak lagi menggunakan surat kabar sebagai medianya (Vivian, 2015:263).

Tabel I.1

| Portal Berita <i>Online</i> | Posisi 10 Besar | Update Berita | Jumlah Berita |
|--------------------------------|--------------------|--|---------------|
| Detik.com | 2 | 31 Desember 2019-17 Februari 2020 & 12 September 2020-19 September 2020 | 113 berita |
| Kompas.com | 3 | 31 Desember 2019-25 Februari 2020 & 12 September 2020-30 September 2020 | 59 berita |
| Liputan6.com | 4 | 31 Desember 2019-3 Februari 2020 & 13 September 2020 | 43 berita |
| Tribunnews.com | 1 | 2 Januari 2020-25 Januari 2020 & 12 September 2020-14 September 2020 | 74 berita |
| Merdeka.com | 6 | 1 Januari 2020-12 Januari 2020 & 12 September 2020 | 40 berita |
| Kapanlagi.com | 5 | - | |
| Okezone.com | 7 | 2 Januari 2020-2 Februari 2020 & 14 September 2020-16 September 2020 | 38 berita |
| Tempo.co | 8 | 7 Januari-20 Januari 2020 & 12 September 2020-22 September 2020 | 45 berita |
| Bola.com | 9 | - | |
| Viva.co.id | 10 | 3 Januari 2020-5 februari 2020 | 18 berita |

Sumber : www.argiacyber.com

Penulis memilih tiga portal berita *online*, yaitu Kompas.com, Detik.com, dan Liputan6.com dikarenakan tiga portal berita *online* tersebut masuk dalam sepuluh portal berita *online* terbaik. Dengan posisi Detik.com pada urutan kedua, Kompas.com pada urutan ketiga, Liputan6.com pada urutan keempat. Ketiga portal media *online* tersebut juga memberitakan konflik Natuna dengan cepat dan *update*. Detik.com mengunggah berita konflik Natuna pada tanggal 31 Desember 2019

[Type here]

sampai 17 Februari 2020, serta 12 September 2020 sampai 19 September 2020. Lalu Kompas.com mengunggah berita konflik Natuna pada tanggal 31 Desember 2019 sampai 25 Februari 2020, serta 12 September 2020-30 September 2020. Sedangkan Liputan6.com mengunggah berita konflik Natuna pada tanggal 31 Desember 2019 sampai 3 Februari 2020, serta 13 September 2020.

Ada pula portal berita *online* yang penulis tidak gunakan, yaitu Tribunnews.com yang juga menempati posisi pertama sebagai portal berita *online* terbaik. Alasan penulis tidak memilih Tribunnews.com yang menempati posisi pertama karena karena judulnya yang *clickbait* seperti “Wow”, dan “Heboh”. Hal ini merupakan dramatisasi yang masuk dalam indikator objektivitas.



Gambar 1.1 dan 1.2 Berita menggunakan judul *clickbait* “Wow & Heboh”

Sumber : Tribunnews.com

Lalu, Tribunnews.com juga tidak cepat dan sedikit memberi *update* berita dengan baru mengunggah berita pada tanggal 2 Januari 2020 dan hanya sampai pada 25 Januari 2020, walau pada konflik Natuna di bulan September Tribunnews.com mengunggah berita pada tanggal 12 September 2020 sampai 14 September 2020.

Selanjutnya terdapat Merdeka.com. Hal ini dikarenakan Merdeka.com juga tidak cepat dan sedikit memberi *update* berita dengan tanggal unggahan hanya dari

[Type here]

tanggal 1 Januari 2020 sampai 12 Januari 2020. Serta untuk konflik di Natuna yang terjadi bulan September, berita hanya diunggah pada tanggal 12 September 2020. Terdapat pula Kapanlagi.com dan Bola.com tidak penulis pilih karena tidak memberikan *update* apapun mengenai konflik Natuna ini.

Lalu Okezone.com, penulis tidak memilih portal berita *online* ini karena juga tidak cepat dalam memberitakan dan tidak memberi *update* berita yang cukup. Okezone.com mengunggah berita mengenai konflik Natuna pada tanggal 2 Januari 2020 sampai 2 Februari 2020 saja, sedangkan pada bulan September hanya pada tanggal 14 September 2020 sampai 16 September 2020 saja.

Selanjutnya, terdapat Tempo.com yang penulis tidak pilih, hal ini dikarenakan Tempo.com baru mengunggah berita konflik Natuna pada tanggal 7 Januari 2020 sampai 20 Januari 2020 saja, walau pada konflik Natuna bulan September Okezone.com mengunggah berita pada tanggal 12 September 2020 sampai 22 September 2020.

Dan yang terakhir penulis tidak memilih Viva.co.id, hal ini dikarenakan Viva.co.id tidak memberi *update* berita dengan lengkap, yaitu hanya mengunggah berita pada 3 Januari 2020 sampai 5 Februari 2020 dengan jumlah berita hanya 18 berita saja. Sedangkan konflik Natuna yang terjadi pada bulan September, Viva.co.id tidak memberi *update* apapun.

Dari ketiga portal berita *online* tersebut penulis menduga adanya pemihakan kepada Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam konflik Natuna ini melibatkan hubungan bilateral antara dua negara yaitu China dan Indonesia, maka sebagai

[Type here]

media Indonesia penulis ingin melihat keobjektivitasan ketiga media tersebut. Hal ini didasari pula dengan melihat adanya peran pers dalam memberikan ruang kepada pemerintah untuk melaksanakan tujuan dan kepentingan-kepentingannya, karena dalam konflik Natuna ini masyarakat akan menyoroti kinerja pemerintah dalam menanganinya. Maka saat ini pula, pemerintah akan melaksanakan tujuan dan kepentingannya melalui pers untuk menjaga dukungan yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan salah satu berita yang diunggah oleh Detik.com pada tanggal 3 Januari 2020 yang berjudul “Laut Natuna Diklaim China, TNI Siaga Tempur”,

Gambar I.3 Berita berjudul “Laut Natuna Diklaim China, TNI Siaga Tempur”

Sumber : Detik.com



[Type here]

Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan **China** telah melakukan pelanggaran batas wilayah **di Laut Natuna**. TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di kawasan tersebut.

Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono, mengatakan operasi siaga tempur dilaksanakan oleh Koarmada 1 dan Koopsau 1 dengan Alutsista yang sudah digelar, yaitu tiga KRI dan satu Pesawatintai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU. Dua KRI lagi masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna.

"Selanjutnya dikatakan Pangkogabwilhan I bahwa operasi ini digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Natuna Utara," demikian keterangan tertulis yang disampaikan Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman, Jumat (3/1/2020).

Yudo Margono mengatakan wilayah Natuna Utara saat ini menjadi perhatian bersama. Karena itu, operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai 2020.

"Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka. Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

"Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna," ujar Retno setelah mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Penulis menduga adanya unsur dramatisasi, hal ini dilihat dari penggunaan kalimat pada judul. Kalimat yang sesungguhnya adalah "Operasi Siaga Tempur" dimana kegiatan ini merupakan pengendalian wilayah laut yang dilaksanakan oleh Kogabwilhan I. Namun, agar terkesan sensasional maka kata Operasi dihilangkan,

[Type here]

dan hanya menggunakan kalimat “Siaga Tempur” saja. Selain itu, berita tersebut juga tidak mengandung *cover both side*. Walau memuat lebih dari satu narasumber, namun narasumber yang dimuat hanyalah dari pihak Indonesia yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya Yudo Margono dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi. Melihat dari isi berita tersebut, penulis menduga bahwa Detik.com memihak kepada Indonesia.

Melihat salah satu berita yang diunggah oleh Kompas.com pada tanggal 4 Januari 2020 yang berjudul “Klaim China dan ‘Harta Karun’ Menggiurkan di Laut Natuna”

Gambar I.4 Berita berjudul “Klaim China dan ‘Harta Karun’ Menggiurkan di Laut Natuna”

Sumber : Kompas.com



[Type here]

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan Indonesia **China** dalam beberapa hari terakhir sedang panas dingin. Ini setelah insiden masuknya kapal-kapal nelayan asal China yang dikawal kapal coast guard terdeteksi masuk ke perairan **Natuna** secara ilegal.

Masuknya kapal-kapal Negeri Tirai Bambu di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia membuat berang pihak Indonesia. Pemerintah sendiri, lewat Kementerian Luar Negeri, telah mengirim nota protes resmi dan memanggil Dubes China untuk Indonesia di Jakarta.

Selain kaya sumber daya perikanan dan alamnya yang indah, perairan **natuna**.

Dilansir dari *Harian Kompas*, 23 Juli 2016, Haposan Napitupulu, mantan Deputi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu **Minyak** dan Gas, menjabarkan kalau laut Natuna memiliki cadangan **minyak** dan gas (**migas**) yang sangat besar.

Salah satu blok migas di Natuna yang cadangannya sangat besar lapangan gas Natuna D-Alpha dan lapangan gas Dara yang kegiatan eksplorasinya telah dilakukan sejak akhir 1960-an.

Ketika itu salah satu perusahaan migas Italia, Agip, melakukan survei seismik laut yang ditindaklanjuti dengan melakukan 31 pengeboran eksplorasi.

Kegiatan ini berhasil menemukan cadangan migas terbesar sepanjang 130 tahun sejarah permigasan Indonesia dengan cadangan gas 222 triliun kaki kubik (TCF) dan 310 juta bbl minyak, dengan luas 25 x 15 km² serta tebal batuan reservoir lebih dari 1.500 meter.

Namun, sayangnya, hingga ditemukan pada 1973, lapangan gas D-Alpha ini belum dapat dieksploitasi karena membutuhkan biaya yang tinggi disebabkan kandungan gas CO₂-nya yang mencapai 72 persen.

Pada 1980, pengelolaan blok ini digantikan oleh Esso dan Pertamina. Esso kemudian bergabung dengan Mobil Oil menjadi ExxonMobil dan telah menghabiskan biaya sekitar 400 juta dollar AS untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan kajian pengembangan lapangan. Namun, tetap saja lapangan gas ini belum berhasil dieksploitasi.

Saat ini ada 13 perusahaan migas, dua di antaranya perusahaan migas nasional, melakukan kegiatan operasi perminyakan di Laut Natuna. Enam blok di antaranya telah dan akan berproduksi. Tujuh blok lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

Keempat blok **produksi** di Laut Natuna ini masing-masing adalah ConocoPhillips, Premier Oil, Star Energy, dan TAC PAN (Pertamina) dengan total produksi migas yaitu produksi minyak 25.000 bbl per hari, produksi gas 491 juta kaki kubik per hari serta produksi LPG sejumlah 19.000 ton per tahun.

Produksi gas dari blok-blok produksi di Laut Natuna sebagian besar disalurkan ke Malaysia dan Singapura. Kontraknya masih berlanjut sampai 2021-2022.

Jika telah selesai pembangunan jalur pipa ke Batam, sebagian gas bumi berjumlah sekitar 40 juta kaki kubik per hari akan disalurkan ke Pulau Batam yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Gas bumi dari lapangan Belanak di Indonesia disalurkan ke Lapangan Duyong, Malaysia, melalui jalur pipa laut sepanjang 98 kilometer yang kemudian dipipakan ke Kertih di pantai timur semenanjung untuk diolah di industri petrokimia.

Ironisnya, sebagian produk petrokimianya itu diekspor ke Indonesia.

Klaim China di **Laut China Selatan**, tepatnya terhadap Laut Natuna, Indonesia, seharusnya memicu pemerintah menggalakkan kegiatan operasi migas di wilayah ini.

Apalagi kegiatan ini telah berlangsung lebih dari 50 tahun, khususnya pengembangan lapangan gas D-Alpha yang sejak ditemukan pada 1973 dan lapangan gas Dara yang ditemukan pada 2000 hingga saat ini belum berhasil dieksploitasi.

Klaim China

Dasar yang dipakai Negeri Tirai Bambu mengklaim perairan Natuna yang masuk wilayah Laut China Selatan adalah sembilan garis putus-putus atau nine dash line.

Nine dash line merupakan garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Dalam UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang kaitannya dengan hak negara melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut internasional.

Di sisi lain, meski Beijing juga merupakan anggota UNCLOS, negara itu tidak mengakui ZEE di Laut China Selatan.

Dalam peta Laut China Selatan yang diterbitkan China mengacu pada nine dash line, wilayah perairan China membentang luas ke Natuna, yang jaraknya ribuan kilometer jauhnya dari daratan utama Tiongkok.

Wilayah yang masuk dalam nine dash line yakni melingkupi Kepulauan Paracel yang juga sama-sama diklaim Vietnam dan Taiwan, hingga laut di Kepulauan Spratly dimana China bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunai Darussalam.

Panjangnya nine dash line China atas klaim hampir seluruh Laut China Selatan, membuat negara itu bersengketa secara tumpang tindih dengan wilayah ZEE negara-negara tetangga Indonesia.

Selain itu, dalam sengketa China negara-negara ASEAN, diputuskan dalam South China Sea Tribunal 2016 menyatakan bahwa China tak memiliki hak atas Laut China Selatan.

Soal Natuna, putusan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penulis menduga adanya unsur dramatisasi, dinilai dari penggunaan kalimat “Harta Karun” dan kata “Menggiurkan” yang memberi kesan sensasional. Lalu, terdapat pula pencampuran opini wartawan dalam berita yang ditulis tersebut. Namun walau demikian, pada berita tersebut memuat unsur *cover both side* karena terdapat dua gagasan secaraimbang mengenai dasar hukum yang diakui oleh China dan yang diakui oleh Indonesia. Selain itu, juga terdapat kesesuaian antara judul dengan isi berita. Melihat dari isi berita, penulis menduga bahwa Kompas.com berimbang atau tidak memihak China maupun Indonesia. Selain menyertakan gagasan yang berimbang, dari keseluruhan berita Kompas.com menjelaskan kekayaan yang ada di Natuna, sehingga menjadi perebutan antara dua negara tersebut tanpa memasukkan unsur keberpihakannya terhadap Indonesia.

Berdasarkan pula dari salah satu berita yang diunggah oleh Liputan6.com pada tanggal 6 Januari 2020 yang berjudul “Tingkah Kapal China Kelabui Radar Indonesia di Laut Natuna”

Gambar I.5 Berita berjudul “Panglima TNI dan Menhan Bahas Kapal China Masuk Natuna di Kemenko Polhukam”

Sumber : Liputan6.com



Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terlihat hadir di kantor Menko Polhukam Mahfud Md untuk mengikuti rapat koordinasi terbatas antarkementerian.

Berdasarkan informasi, para pejabat tinggi itu akan membahas soal perbatasan Natuna, yang baru-baru ini dilewati kapal-kapal China.

Berdasarkan pantauan, selain Marsekal Hadi dan Prabowo, turut hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menkumham Yasonna H Laoly, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kemudian ada Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kabakamla Laksamana Madya Achmad Taufieqoerrochman, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.

Perlu diketahui, sejumlah kapal asing diduga milik China dua pekan lalu memasuki perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna untuk mencuri ikan. Pemerintah Indonesia sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke China.

Pemerintah RI melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri kemarin kembali menegaskan, Indonesia dengan tegas menolak klaim historis China atas ZEEI.

"Klaim historis China atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," demikian pernyataan yang diberikan oleh Kemlu RI.

[Type here]

Dalih Pemerintah China

Setelah protes dilayangkan oleh Kemlu RI, pihak China berdalih bahwa kapal yang memasuki perairan Natuna masih dalam batas wilayahnya.

"China masih memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi atas perairan dekat dengan Kepulauan Nansha," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang dalam laman resmi Kementerian Luar Negeri China.

Geng Shuang menjelaskan, sudah lama para nelayan China mencari ikan di sekitar Kepulauan Nansha, lokasi yang dianggap sebagai ZEE Indonesia.

Dalam berita yang diunggah oleh Liputan6.com ini terdapat unsur fakta sosiologis, hal ini terlihat dari penggunaan kata “beberapa” dan “diduga”. Namun dalam berita tersebut terdapat unsur *cover both side*, hal ini dikarenakan berita tersebut memasukkan dua pendapat dari dua tokoh yang berbeda dan berlawanan, yakni kemenlu RI dan kemenlu China. Selain itu terdapat pula kesesuaian judul dengan isi berita. Berdasarkan isi berita, penulis menduga bahwa Liputan6.com netral atau tidak memihak.

Adanya saling keterkaitan dan saling membutuhkan antara pers terutama pemegang kekuasaan dengan pemerintah, penulis tertarik meneliti pemberitaan konflik China-Indonesia di Laut Natuna dengan menggunakan penelitian objektivitas. Hal ini dikarenakan dalam pemberitaan konflik China-Indonesia di Laut Natuna tentunya menyangkut pemerintah baik secara kinerja maupun kebijakannya dalam mengatasi konflik tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki keraguan terhadap objektivitas tiga portal berita tersebut. Maka untuk itu penulis ingin mengetahui dan menilai apakah pemberitaan yang ditulis tiga portal berita tersebut objektif.

[Type here]

Analisis isi ialah metode ilmiah yang memanfaatkan dokumen untuk menekuni serta memperoleh kesimpulan dalam fenomena (Eriyanto, 2011:10). Maka dari itu, penulis mengumpulkan berbagai jenis berita dari tiga media berita yang berbeda untuk melihat tingkat objektivitas dari media tersebut. Penelitian kali ini, penulis memakai indikator penelitian Truth, Relevansi, dan Impartiality (Siahaan, 2001:100).

Adapun penelitian terdahulu milik Angela Yerosela Ramonda Cahyanti yang memiliki judul Tingkat Objektivitas Pemberitaan Kampanye Terbuka Capres dan Cawapres Dalam Pilpres Indonesia 2019 di Media *Online* Okezone.com, Viva.co.id, Mediaindonesia.com dan Republika.co.id. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan kampanye terbuka capres dan cawapres pada Pilpres 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat media *online* yaitu Okezone.com, Viva.co.id, Mediaindonesia.com dan Republika.co.id memiliki objektivitas tinggi. Dari empat media *online* tersebut, yang memiliki objektivitas paling tinggi adalah republika.co.id. Sedangkan yang memiliki objektivitas paling rendah yaitu viva.co.id.

Penelitian terdahulu milik Marchellina Andreina Andrijanto yang memiliki judul Objektivitas Pemberitaan Tentang Sosok Ahok dan Habib Rizieq di Koran Kompas. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan mengenai Ahok dan pemimpin Front Pembela Islam dalam kasus penistaan agama. Penelitian ini memberikan hasil bahwa koran Kompas objektif dalam memberitakan sosok Ahok dan Habib Rizieq. Pemberitaan mengenai sosok Ahok memiliki keunggulan pada indikator *factualness*, pencampuran fakta & opini, relevan, *cover both sides*, dan dramatisasi.

[Type here]

Sedangkan pemberitaan mengenai sosok Habib Rizieq memiliki keunggulan pada indikator kesesuaian judul dan nilaiimbang.

Penelitian terdahulu milik Vincentio Rahardi Putra yang memiliki judul Objektivitas Pemberitaan Kampanye Cagub Dalam Pilkada Jatim 2018 di Surat Kabar Harian Bhirawa. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan kampanye cagub dan cawagub dalam pilkada Jatim 2018 yang mempertemukan pasangan Khofifah-Emil dengan Gus Ipul-Puti yang terdapat pada surat kabar Harian Bhirawa. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pemberitaan kedua pasangan cagub dan cawagub di surat kabar Harian Bhirawa yaitu objektif. Pada pemberitaan mengenai Khofifah-Emil terdapat tingkat objektivitas tertinggi pada indikator *cover both sides*, nilaiimbang, dan *factualness*. Sedangkan pada pemberitaan mengenai Gus Ipul-Puti terdapat tingkat objektivitas lebih tinggi pada indikator dramatisasi, akurasi, pencampuran opini dan fakta, serta relevan.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana objektivitas pemberitaan Konflik China-Indonesia di Laut Natuna Pada Portal Berita *Online* Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui objektivitas pemberitaan Konflik China-Indonesia di Laut Natuna Pada Portal Berita *Online* Kompas.com, Detik.com, Liputan6.com.

I.4 Batasan Masalah

Batasan objek penelitian ini adalah objektivitas pemberitaan konflik China-Indonesia di laut Natuna. Dan batasan subjek penelitian ini adalah portal berita *online* kompas.com, Detik.com, liputan6.com. Penulis mengambil edisi berita dari tanggal 31 Desember 2019 sampai tanggal 17 Februari 2020.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberi efek kognitif kepada pembaca, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi mengenai objektivitas pemberitaan.

I.5.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi portal berita *online* Kompas.com, Detik.com, liputan6.com, dan portal berita *online* yang lain mengenai tingkat objektivitas berita yang dimuat dalam laman portal berita *online* nya.